

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan dan jumlah komposisi tenaga kerja tersebut akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografis. Pada tahun 2004, di Jawa Tengah terdapat 32.397.431 orang, terdiri dari 16.184.251 orang penduduk laki-laki atau sekitar 49,96 % dan 16.213.180 orang penduduk perempuan atau sekitar 50,04 persen. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,07 persen bila dibanding tahun 2003 (BPS, 2004).

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Tahun 2003, 2004 Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tahun	
	2003	2004
Laki-laki	15.957.412	16.184.251
Perempuan	16.095.428	16.213.180
Jumlah	32.052.840	32.397.431

Sumber: BPS, Propinsi Jawa Tengah, 2004

Sekitar 23,35 juta atau 72,08 persen dari total penduduk Jawa Tengah merupakan penduduk usia kerja, menurun 0,31 persen dibanding tahun 2003. angkatan kerja pada dasarnya menunjuk pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam hal ini terdiri dari mereka yang bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja pada tahun 2004 di Jawa Tengah tercatat sebanyak 15,86 juta orang atau 67,91 persen dari keseluruhan jumlah

penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja ini didominasi oleh kelompok penduduk bekerja yang tercatat sebesar 63,54 persen atau 14,84 juta dan sisanya yang hanya 4,37 persen atau 1,02 juta adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan (BPS, 2004).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang seberapa besar keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif. TPAK Jawa Tengah pada tahun 2004 tercatat sebesar 67,91 persen. Pengamatan menurut jenis kelamin TPAK laki-laki jauh lebih besar daripada TPAK perempuan, masing-masing sebesar 84,95 persen berbanding 51,36 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada tahun 2004 tercatat 6,44 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 6 penduduk yang mencari pekerjaan. Pengamatan TPT menurut jenis kelamin masih didominasi penduduk perempuan sebesar 7,52 persen, sedangkan laki-laki mencapai 5,76 persen. Tingginya TPT perempuan ini berlawanan dengan TPAK perempuan yang rendah, hal sebaliknya terjadi untuk jenis kelamin laki-laki (BPS, 2004).

Jumlah penduduk yang bekerja yang merupakan bagian dari penduduk yang aktif secara ekonomi sekitar 14,84 juta orang atau 63,54 persen dari total penduduk usia kerja (PUK). Besarnya persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja masing-masing 39,43 persen dan 24,10 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa persentase laki-laki sekitar 1,6 kali lipat dibandingkan perempuan. Bila dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang bekerja mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah

dibanding laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase perempuan yang btidak atau tamat SD di bandingkan laki-laki, yaitu 72,67 persen berbanding 62,78 persen. Sedangkan pendidikan SLTP ke atas mempunyai persentase lebih rendah daripada laki-laki untuk setiap tingkat pendidikan. Sedangkan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2004, mayoritas mempunyai latar pendidikan paling tertinggi adalah = SD, tercatat 66,53 persen pendidikan tinggi atau diploma atau universitas masih merupakan bagian terkecil dari penduduk bekerja, yaitu 4,03 persen (BPS,2004).

Sebagian besar penduduk di Jawa Tengah bekerja dis ektor pertanian, yaitu mncai 41,69 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tanga kerja adalah sektor perdagangan 20,17 persen, sektor industri pengolahan sebanyak 16,02 persen. Sektor lain yang cukup menonjol adalah sektor jasa. Sekor ini menyerap tenaga kerja mencapai 10,35 persen. Sedangkan sektor konstruksi dan komunikasi relatif sama yaitu pada kisaran antara angka 4,5 sampai 5,5 persen (BPS, 2004).

Pada tahun 2004 penduduk Jawa tengah masih banyak yang bekerja sebagai pekerja informal yang umumnya tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun keahlian khusus, yaitu mencapai 55,52 persen yang terdiri dari mereka yang berusaha sendiri sekitar 19,79 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sekitar 19,79 persen dibanding pekerja formal yang mencapai 44,48 persen, yang terdiri mereka yang berusaha dibantu buruh tetap sekitar 3,02 persen dan pekerja dibayar sekitar 41,47 persen. Hal yang cukup

memprihatinkan adalah masih tingginya persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar, dimana proporsi hampir mencapai 30 persen pekerjaan sebagai buruh atau pekerja dibayar dan berusaha sendiri merupakan urutan terbesar berikutnya tercatat 25,93 persen dan 20,78 persen berbeda dengan penduduk laki-laki mayoritas bekerja sebagai buruh atau bekerja dibayar dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap secara persentase hanya sekitar 3 persen yaitu 28,65 persen berbanding 25,14 persen. Disamping itu penduduk laki-laki juga banyak yang bekerja dengan berusaha sendiri 19,18 persen (BPS, 2004).

Penduduk Jawa Tengah yang bekerja yaitu 64,17 persen dari mereka bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu rata-rata jam kerja mereka pada tahun 2004 tercatat jam normal kerja yaitu 35 jam seminggu yaitu selama 38,66 jam dalam seminggu. Dalam pembagian jam kerja wanita dengan laki-laki sangat berbeda. Perbedaan sekitar 5,6 jam dalam seminggu sedangkan penduduk laki-laki rata-rata bekerja selama 40,80 jam seminggu dan penduduk perempuan rata-rata bekerja 5,17 jam seminggu (BPS, 2004).

Pada masa sekarang ini kesempatan kerja semakin sulit untuk dicari, apalagi dengan jumlah penduduk di Indonesia yang besar dan angka pengangguran tinggi maka menjadikan kesempatan kerja berkurang. Namun tidak hanya itu saja yang menyebabkan lesunya kesempatan kerja, tetapi juga keadaan perekonomian yang tidak stabil ikut memberikan andil kenapa masalah tersebut belum teratasi sebelum krisis ekonomi terjadi permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja cukup besar. Permintaan pengusaha atas

tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Seorang pengusaha memperkerjakan tenaga kerja dengan maksud untuk memperlancar proses produksi. Dalam hal tenaga kerja, permintaan tenaga kerja merupakan jumlah maksimum yang diinginkan seorang pengusaha untuk dipekerjakan pada setiap kemungkinan dan dalam jangka waktu tertentu. Pertambahan permintaan akan tenaga kerja tergantung dari permintaan masyarakat akan barang tersebut (Payaman, 1998).

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*Derived demand*) artinya jika permintaan terhadap suatu barang meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Tenaga kerja yang diminta karena adanya perubahan ekonomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga kerja juga tergantung pada perusahaan atau industri yang bersangkutan, jika perusahaan cenderung padat karya maka pemakaian atau penggunaan tenaga kerja meningkat namun jika perusahaan cenderung padat modal penggunaan tenaga kerja relatif kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai salah satu faktor produksi. Biasanya perusahaan atau industri yang menghendaki keuntungan yang maksimal maka dapat memilih jumlah terbaik untuk tenaga kerja akan memunculkan kesempatan kerja yang tinggi dan ini berarti tidak akan lagi terjadi penduduk yang tidak bekerja. Kesempatan kerja merupakan kesempatan untuk memperoleh hak yang adil dalam pembangunan. Salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan suatu negara adalah kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi (Sagir, 1995:23).

Kesempatan kerja meliputi lapangan pekerjaan yang sudah ditempati dan belum ditempati. Dari lapangan pekerjaan yang lowong tersebut timbul permintaan kerja yang datang. Adanya permintaan kerja tersebut mempunyai arti bahwa adanya kesempatan kerja bagi pengangguran. Besarnya lapangan kerja yang belum ditempati atau permintaan tenaga kerja secara riil dibutuhkan oleh perusahaan pada banyak faktor, diantaranya yang paling penting adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan yang meminta tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang harus dibayar dan harga dari faktor produksi lainnya (Tambunan, 1996:64).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh faktor upah, PDRB, *saving* (tabungan), dan pengeluaran pemerintah terhadap permintaan tenaga kerja yang berada di kawasan Jawa tengah dalam skripsi berjudul "ANALISIS PERMINTAAN TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2004".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan ini adalah apakah variabel Upah, PDRB, *saving* (tabungan), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Formal di Daerah Jawa Tengah pada tahun 2004.

C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia yaitu tingginya angka pengangguran dan mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi jumlah pengangguran tersebut.
2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan permintaan tenaga kerja.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional di Jawa Tengah terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Formal di Jawa Tengah..
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Formal di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *saving* (tabungan) terhadap permintaan tenaga kerja sektor formal di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap permintaan tenaga kerja sektor formal di Jawa Tengah.

E. METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperlukan atau dikumpulkan dari pihak lain. Adapun

sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) serta sumber lainnya yang terikat dengan penelitian ini dan merupakan *Cross Section* pada tahun 2004.

2. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ln}L = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln} W + \beta_2 \text{Ln} S + \beta_3 \text{Ln} \text{PDRB} + \beta_4 \text{Ln} G + U_t$$

Dimana :

$\text{Ln} L$ = Permintaan tenaga kerja sektor formal

$\text{Ln} W$ = Upah minimum tiap-tiap kabupaten

$\text{Ln} S$ = *Saving* (tabungan) tiap-tiap kabupaten

$\text{Ln} \text{PDRB}$ = Produk domestik regional bruto tiap-tiap kabupaten

$\text{Ln} G$ = Pengeluaran pemerintah tiap-tiap kabupaten

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi

U_t = Variabel pengganggu

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi teori konsep permintaan tenaga kerja, teori konsep penawaran tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, GNP dan hukum okun, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, penelitian terdahulu, hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi alat dan metode analisis, regresi OLS (*Ordinary Least Square*), uji kepuhan asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji spesifikasi model, uji normalitas), uji kelayakan model (interpretasi R^2 , uji F), uji validitas pengaruh (uji t), data dan sumber data (definisi dan operasional variabel, sumber data).

BAB IV ANALISIS DATA

Analisis ini meliputi deskripsi data, hasil uji kepuhan asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji spesifikasi model, uji normalitas), uji kebaikan model (interpretasi model, uji F), uji validitas pengaruh (uji t) dan interpretasi ekonomi serta implikasi kebijakan.

BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran.